

# ANALISIS DAMPAK TEORI KEYNES DALAM MENGATASI KRISIS EKONOMI MELALUI KEBIJAKAN FISKAL

Nur Indah Melani Aruan \*<sup>1</sup>

Irma Hutagalung <sup>2</sup>

Bonaraja Purba <sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Ekonomi Jurusan Sarjana Ilmu Ekonomi, Universitas Negeri Medan

\*e-mail: [nurindaharuan@gmail.com](mailto:nurindaharuan@gmail.com) <sup>1\*</sup>, [irmahutagalung74@gmail.com](mailto:irmahutagalung74@gmail.com) <sup>2</sup>, [bonarajapurba@gmail.com](mailto:bonarajapurba@gmail.com) <sup>3</sup>,

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak teori Keynes dalam mengatasi krisis ekonomi melalui kebijakan fiskal, yang dimana ini sangat relevan dan menarik. Teori Keynes, yang dikembangkan oleh ekonom John Maynard Keynes, menekankan pentingnya peran pemerintah dalam mengatasi krisis ekonomi. Dalam teori Keynesian, ketika terjadi krisis ekonomi, seperti resesi atau depresi, pasar tidak mampu pulih sendiri karena kurangnya permintaan agregat. Keynes berpendapat bahwa pemerintah harus mengambil langkah-langkah ekspansif untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Salah satu instrumen kebijakan fiskal yang dapat digunakan adalah peningkatan belanja publik. Dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah untuk proyek infrastruktur, pendidikan, atau kesehatan, pemerintah dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan permintaan agregat. Hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi tingkat pengangguran. Selain itu, pemotongan pajak juga merupakan kebijakan fiskal yang dapat digunakan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Dengan mengurangi beban pajak bagi individu dan perusahaan, pemerintah dapat mendorong konsumsi dan investasi yang lebih tinggi. Hal ini akan meningkatkan permintaan agregat dan menggerakkan roda perekonomian.

**Kata kunci:** Analisis dampak, Krisis ekonomi, kebijakan fiskal

## Abstract

This research aims to analyze the impact of Keynes's theory in overcoming the economic crisis through fiscal policy, which is very relevant and interesting. Keynesian theory, developed by economist John Maynard Keynes, emphasizes the important role of government in overcoming economic crises. In Keynesian theory, when an economic crisis occurs, such as a recession or depression, the market is unable to recover on its own because of reduced aggregate demand. Keynes argued that governments should take expansionary measures to stimulate economic growth. One of the fiscal policy instruments that can be used is increasing public spending. By increasing government spending on infrastructure, education, or health projects, governments can create new jobs and increase aggregate demand. This will encourage economic growth and reduce poverty levels. Apart from that, tax cuts are also a fiscal policy that can be used to stimulate economic growth. By reducing the tax burden on individuals and companies, governments can encourage higher consumption and investment. This will increase aggregate demand and move the wheels of the economy.

**Key words:** Impact analysis, economic crisis, fiscal policy

## PENDAHULUAN

Dalam mengatasi krisis ekonomi, teori Keynes mengemukakan bahwa kebijakan fiskal dapat digunakan untuk menggerakkan perekonomian melalui peningkatan pengeluaran pemerintah atau pemotongan pajak yang memiliki efek multiplier dengan cara menstimulasi tambahan permintaan untuk barang konsumsi rumah tangga. Dalam konteks ini, kebijakan fiskal dapat membantu mengatasi krisis ekonomi dengan cara meningkatkan pengeluaran pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran. Namun, dampak dari kebijakan fiskal terhadap perekonomian cenderung lemah karena harus melewati beberapa jalur (mekanisme transmisi) ke perekonomian sehingga melahirkan ketidakpastian efek kebijakan fiskal terhadap perekonomian. Oleh karena itu, kebijakan fiskal harus diimbangi dengan kebijakan moneter yang efektif untuk mencapai tujuan stabilisasi ekonomi. Dalam konteks Indonesia, Badan Kebijakan Fiskal telah melakukan penelitian untuk menganalisis dampak dari peran alokatif pemerintah melalui pengadaan barang dan jasa terhadap perekonomian Indonesia. Selain itu, Badan Kebijakan Fiskal juga telah melakukan pemetaan pola krisis yang telah terjadi di

Indonesia dan beberapa negara, serta menghubungkan pola krisis tersebut dengan model Early Warning System yang dikembangkan Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal dan Technical Assistance ADB 2. Dalam menghadapi reses ekonomi akibat dampak pandemi COVID-19, peran kebijakan fiskal pemerintah Indonesia juga sangat penting. Kebijakan fiskal dapat membantu mengatasi resesi ekonomi dengan cara meningkatkan pengeluaran pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran.

Dalam hal ini pertumbuhan ekonomi menunjukkan aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan prosesnya yang berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi (Tambunan, 2001:43). Perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila banyak sektor ekonomi yang tumbuh. Dilansir dari Kompas.com, pada tahun 1999 pemerintah menerapkan reformasi kebijakan ekonomi di sejumlah sektor sehingga laju pertumbuhan ekonomi mulai mengalami peningkatan sebesar 0,79%. Secara perlahan laju pertumbuhan ekonomi tumbuh menjadi 4,92% pada tahun 2000. Pemerintah menerapkan kebijakan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah dengan membagi dana secara berimbang antara pusat dan daerah namun meski demikian, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2001 tumbuh melambat menjadi 3,64%. Krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19 yang berdampak pada merosotnya ekonomi dan kesejahteraan masyarakat mendorong pemerintah untuk menyeimbangkan kebijakan dalam memulihkan kesehatan dan membangkitkan ekonomi.

Teori Keynes telah menjadi dasar dari filosofi kebijakan ini muncul sebagai reaksi dari depresi besar yang terjadi pada sistem ekonomi Amerika di tahun 1930-an. Kritik yang disampaikan Keynes terhadap ahli ekonomi Klasik yang berpendapat bahwa perekonomian akan selalu full employment. Namun, sistem pasar bebas yang dikemukakan oleh Keynes tidak akan otomatis membuat penyesuaian kondisi pekerjaan penuh, karena diperlukan adanya campur tangan pemerintah dalam bentuk kebijakan pemerintah, yaitu kebijakan fiskal dan moneter. Dikarenakan, tiap tambahan belanja negara bukan hanya merelokasikan sumber daya dari sektor swasta kepada pemerintah, namun diikuti timbulnya multiplier effect atas belanja tersebut. (Mankew, 2013). Teori angka pengganda fiskal yang disampaikan Keynes ini didasari oleh pemikiran bahwa ekspansi fiskal dapat menyebabkan dampak pengganda pada permintaan agregat yaitu kemampuan penawaran agregat dalam merespon kenaikan permintaan agregat, sehingga kenaikan harga tidak akan terjadi. (Abimanyu, 2005). Kebijakan fiskal mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, karena meningkatnya produksi nasional yang didorong oleh pemerintah. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mempengaruhi keadaan pasar barang dan jasa agar kondisi perekonomian semakin membaik. Kebijakan fiskal ini memiliki dua sifat yaitu ekspansif dan kontraktif. Kebijakan fiskal ekspansif dapat dilakukan dengan penambahan pengeluaran, penambahan pembayaran transfer atau subsidi, dan pengurangan potongan pajak. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang menjadi wewenang pemerintah untuk menyesuaikan anggaran pendapatan dan pengeluaran negara dengan APBN yang sudah ditentukan sebelumnya dengan membuat perubahan pada sistem pajak yang berlaku (Feranika & Haryati, 2020). Oleh karena itu, sangat wajar apabila kebijakan fiskal setiap tahunnya berbeda (Sudirman, 2014). Pajak dan belanja/pengeluaran negara merupakan instrumen yang digunakan pemerintah dalam kebijakan fiskal (Maski, 2012).

## METODE

Metode menggunakan pendekatan kualitatif pada penelitian ini. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pertanyaan yang bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan suatu gejala pada fakta yang ada (Ardianto, 2019; Semiawan, 2010). Metode kualitatif juga terbuka dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada proses penelitian (Ardianto, 2019). Penelitian ini dikatakan kualitatif karena pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk mengkaji atau meneliti suatu objek pada latar alamiah tanpa ada manipulasi di dalamnya, dan hasil yang diharapkan pun bukanlah berdasarkan ukuran-ukuran kuantitas, melainkan makna atau segi kulit dari fenomena yang di amati.

Dalam penelitian ini, peneliti menyelidik masyarakat-masyarakat yang mengalami dampak dari krisis ekonomi. Kasus-kasus dalam pendekatan ini dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah di tentukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Krisis Ekonomi dan Dampaknya

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengalami krisis mata uang yang kemudian disusul dengan oleh krisis moneter dan berakhir dengan krisis multidimensi. Krisis yang terjadi akibat krisis rupiah tersebut dapat dijelaskan dari sisi penawaran agregat dan permintaan agregat (Tambunan, 2000). Dari sisi penawaran, depresiasi nilai rupiah mempengaruhi nilai rupiah utang luar negeri dan harga barang impor. Depresiasi nilai rupiah melebihi 300% membuat nilai rupiah dari bunga dan utang pokok yang harus dibayar meningkat drastis. Meningkatnya beban bunga dan utang tersebut menimbulkan kesulitan pada perusahaan-perusahaan yang mempunyai utang luar negeri dalam jumlah yang besar. Kondisi tersebut menyebabkan laba perusahaan menurun, kemudian modal kerja berkurang yang berakibat kemampuan investasinya juga menurun. Selanjutnya kondisi tersebut menyebabkan volume produksi menurun dan akhirnya terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap tenaga kerja.

Dari permintaan agregat, depresiasi rupiah menyebabkan kemampuan daya beli masyarakat menurun. Hal tersebut disebabkan oleh kombinasi dari tiga faktor, yaitu: (1) laju inflasi yang tinggi, (2) gaji atau upah nominal yang relatif tetap, dan (3) PHK meningkat. Dengan kemampuan belanja masyarakat yang menurun maka daya serap terhadap produk juga menurun. Kondisi tersebut memaksa perusahaan menurunkan jumlah produksinya. Krisis multidimensi menyebabkan perekonomian Indonesia mengalami kontraksi. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 1998 perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar -13,68%. Padahal tahun-tahun sebelumnya pertumbuhannya selalu positif, yakni 4,91% pada tahun 1997, tahun 1996 sebesar 7,82%, tahun 1995 sebesar 8,22% dan 7,54% pada tahun 1994. Pada tahun 1998 sebagian besar sektor ekonomi mengalami pertumbuhan negatif, kecuali sektor pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan yang mampu tumbuh sebesar 0,81%, serta sektor listrik, gas dan air minum yang tumbuh 1,86%.

Ada beberapa faktor penyebab terjadinya krisis ekonomi yang kompleks dan saling terkait. Berikut adalah beberapa penyebab umumnya:

1. Kelebihan Utang Dan Krisis Keuangan

Akumulasi utang yang tidak terkendali, baik di tingkat pemerintah, perusahaan, atau individu, dapat menyebabkan krisis keuangan. Ketika utang melebihi kemampuan untuk membayar kembali atau ketika terjadi kegagalan pembayaran utang yang signifikan, hal ini dapat menciptakan ketidakstabilan dalam sistem keuangan dan memicu krisis ekonomi.

2. Ekonomi Yang Tidak Seimbang

Ketidakeimbangan pada ekonomi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti defisit perdagangan yang berkelanjutan, ketimpangan neraca pembayaran, atau ketimpangan pendapatan yang signifikan antara kelompok masyarakat. Ketidakeimbangan ini dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi jangka panjang dan menyebabkan krisis.

3. Krisis Perbankan

Kegagalan sistem perbankan atau kerentanan dalam industri keuangan dapat memicu krisis ekonomi. Ketika bank-bank mengalami masalah likuiditas, kredit macet meningkat, atau ada kepanikan di sektor perbankan, itu dapat menyebabkan penurunan ketersediaan kredit, merosotnya kepercayaan publik, dan menimbulkan krisis yang meluas.

4. Gejolak di Pasar Keuangan

Ketika harga aset melebihi nilai sebenarnya dan kemudian terjadi koreksi yang tajam, hal itu dapat menyebabkan kerugian besar, ketidakpastian, dan ketidakstabilan ekonomi secara keseluruhan.

#### 5. Krisis Global

Faktor eksternal seperti krisis ekonomi global atau guncangan ekonomi di negara lain juga dapat berdampak pada perekonomian suatu negara. Ketergantungan terhadap ekspor, perubahan dalam aliran modal, atau krisis di negara mitra dagang dapat mengganggu perekonomian secara signifikan dan menyebabkan krisis.

#### 6. Kegagalan Kebijakan Ekonomi

Kebijakan ekonomi yang tidak tepat, termasuk kebijakan moneter, fiskal, atau struktural yang tidak efektif atau tidak bijaksana, dapat menyebabkan krisis ekonomi.

### **Teori Keynes dalam mengatasi krisis ekonomi**

Krisis ekonomi merupakan sebuah peristiwa dimana seluruh sektor ekonomi pasar dunia mengalami keruntuhan yang pada akhirnya mempengaruhi sektor lainnya di seluruh dunia. Krisis ekonomi adalah sebuah konsep yang menjelaskan suatu kondisi perekonomian suatu negara mengalami resesi atau depresi. Krisis ekonomi yang berkelanjutan pada suatu negara dapat memicu resesi ekonomi. Resesi ekonomi merupakan penurunan signifikan yang berlangsung selama dua kuartal berturut-turut, atau lebih dari satu tahun pada kegiatan ekonomi yang berlangsung pada suatu negara. Penurunan pertumbuhan ekonomi yang terjadi disertai penurunan harga saham dan properti yang kemudian menjadi sebuah kemerosotan ekonomi yang semakin parah. Pemerintah Indonesia melalui kebijakan fiskal, khususnya dari sisi pajak telah dengan sigap menyediakan kebijakan-kebijakan dalam membantu pelaku usaha demi bertahan di tengah ketidakpastian akan resesi dalam perekonomian Indonesia. Kebijakan stimulus fiskal melalui pajak yang diberikan pemerintah Indonesia tidak sepenuhnya menjamin keberlangsungan suatu usaha dapat bertahan. Meski demikian, relaksasi dan insentif pajak dirasa cukup membantu cash flow perusahaan, dimana dana yang seharusnya disetorkan ke kas negara, dapat tetap tersimpan dalam perusahaan untuk mempertahankan usahanya.

Insentif pajak berperan sebagai regulasi dari pemerintah yang bertujuan untuk menggerakkan kembali roda perekonomian dalam upaya pencegahan resesi ekonomi yang lebih parah. Inflasi adalah salah satu masalah klasik dalam dunia perekonomian yang mana dapat berpengaruh terhadap pendapatan riil masyarakat yang kemudian secara berkelanjutan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian makro. Tekanan inflasi ini bukan hanya berdampak pada konsumen saja, namun juga memberikan dampak bagi para produsen yang sekaligus berpengaruh terhadap gejala pertumbuhan ekonomi. Teori Keynesian menyatakan bahwa dalam jangka pendek, output nasional dan kesempatan kerja utamanya ditentukan oleh permintaan agregat. Konsep-konsep Keynesian menunjukkan bahwa peran dari pemerintah sangatlah penting untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi. Para tokoh Keynesian menentang pandangan dari monetaris mengenai hubungan antara kuantitas uang dan harga. Kekuatan teori Keynesian, yaitu integrasi dari teori moneter pada satu sisi serta teori output dan kesempatan kerja melalui suku bunga pada sisi yang lain. Ketika kuantitas uang meningkat dan tingkat bunga jatuh menyebabkan peningkatan volume investasi dan permintaan agregat sehingga output dan kesempatan kerja meningkat (Simanungkalit, 2020). Pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan memiliki tugas untuk menjaga stabilitas ekonomi dengan menggunakan wewenang mengeluarkan kebijakan. Pemerintah memiliki legitimasi untuk membuat suatu kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang ekonomi. Kebijakan yang digunakan pemerintah dalam bidang ekonomi dapat berupa kebijakan fiskal.

Teori Keynesianisme atau ekonomi Keynesian adalah suatu teori terkait dengan campur tangan pemerintah dalam mengatasi krisis ekonomi. Teori ini berpendapat bahwa mekanisme pasar bebas tidak secara otomatis menciptakan stabilitas dan keseimbangan ekonomi, karena adanya kekakuan dalam berbagai sektor ekonomi. Oleh karena itu, untuk menciptakan stabilitas

dan keseimbangan ekonomi diperlukan peran pemerintah secara aktif atau government intervention yang meliputi kebijakan fiskal (fiscal policy) dan kebijakan moneter (monetary policy) Dalam teori Keynesian, kebijakan fiskal dianggap sebagai salah satu cara untuk mengatasi krisis ekonomi. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengeluaran dan penerimaan negara. Kebijakan fiskal dapat dilakukan dengan cara meningkatkan pengeluaran pemerintah atau menurunkan pajak. Dalam situasi krisis ekonomi, pemerintah dapat meningkatkan pengeluaran untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan menurunkan pajak untuk mendorong konsumsi masyarakat.

### **Studi Kasus Implementasi Kebijakan dalam Mengatasi Krisis Ekonomi Menggunakan Pendekatan Keynes**

Implementasi kebijakan fiskal dalam mengatasi krisis ekonomi dengan pendekatan Keynes ini merupakan strategi yang telah terbukti efektif dalam memulihkan perekonomian yang sedang mengalami tekanan. Pendekatan Keynesian didasarkan pada pemikiran ekonom John Maynard Keynes, yang berpendapat bahwa dalam situasi krisis ekonomi, pemerintah harus mengambil peran aktif dalam mengatasi masalah tersebut melalui kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal dalam konteks ini mencakup pengeluaran pemerintah dan perubahan dalam sistem perpajakan. Dalam menghadapi krisis ekonomi, pemerintah dapat meningkatkan pengeluaran publik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat dilakukan melalui program stimulus ekonomi, seperti investasi infrastruktur, bantuan sosial, atau insentif pajak bagi sektor-sektor yang terdampak.

Selain itu, pemerintah juga dapat menggunakan kebijakan perpajakan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Misalnya, pemotongan pajak bagi individu dan perusahaan dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong investasi. Selain itu, pemerintah juga dapat menggunakan kebijakan pajak progresif, di mana individu dengan pendapatan lebih tinggi dikenakan pajak lebih tinggi, untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan distribusi pendapatan. Implementasi kebijakan fiskal dalam mengatasi krisis ekonomi juga melibatkan koordinasi antara pemerintah, bank sentral, dan sektor swasta. Pemerintah perlu bekerja sama dengan bank sentral untuk memastikan kebijakan moneter yang mendukung kebijakan fiskal. Selain itu, kerjasama dengan sektor swasta juga penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendorong pertumbuhan sektor riil. Namun, dalam mengimplementasikan kebijakan fiskal, pemerintah perlu mempertimbangkan beberapa faktor penting. Salah satunya adalah memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kondisi ekonomi dan kebutuhan masyarakat.

#### 1) Kondisi Ekonomi Saat Ini

Pemerintah perlu memperhatikan kondisi ekonomi saat ini, termasuk tingkat pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, dan stabilitas keuangan. Dengan memahami kondisi ini, pemerintah dapat menentukan jenis kebijakan fiskal yang tepat untuk mengatasi krisis ekonomi.

#### 2) Kebutuhan Masyarakat

Kebijakan fiskal harus didasarkan pada kebutuhan masyarakat. Pemerintah perlu memahami masalah ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat, seperti pengangguran, kemiskinan, atau ketimpangan pendapatan. Dengan memperhatikan kebutuhan ini, pemerintah dapat merancang kebijakan fiskal yang dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

#### 3) Keberlanjutan Kebijakan

Penting untuk mempertimbangkan keberlanjutan kebijakan fiskal dalam jangka panjang. Kebijakan yang diambil harus dapat dipertahankan dan tidak menyebabkan masalah keuangan di masa depan. Pemerintah perlu memperhatikan sumber pendanaan kebijakan fiskal dan dampaknya terhadap defisit anggaran dan utang negara.

#### 4) Dampak Jangka Panjang

Pemerintah harus mempertimbangkan dampak jangka panjang dari kebijakan fiskal yang diambil. Kebijakan yang baik harus mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan daya saing, dan menciptakan lapangan kerja. Pemerintah juga harus memperhatikan dampak kebijakan fiskal terhadap lingkungan dan keberlanjutan ekonomi secara keseluruhan.

Keynes berpendapat bahwa perekonomian tidak selalu berada dalam keseimbangan dan bahwa terdapat kemungkinan terjadinya krisis yang disebabkan oleh kelebihan pasokan uang tunai dan kekurangan permintaan agregat. Dalam situasi ini, pasar tidak dapat memperbaiki sendiri dan kebijakan pemerintah diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut. Kebijakan fiskal adalah salah satu cara untuk mengatasi masalah tersebut. Kebijakan fiskal mencakup penggunaan anggaran dan pajak untuk mengontrol pengeluaran pemerintah dan pendapatan rumah tangga. Dalam teori ekonomi Keynesian, ketika perekonomian mengalami kelebihan pasokan uang tunai dan kekurangan permintaan agregat, pemerintah harus mengambil tindakan untuk meningkatkan pengeluaran pemerintah dan/atau menurunkan pajak untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga. Salah satu contoh dari kebijakan fiskal adalah pengeluaran pemerintah pada proyek-proyek infrastruktur. Dalam situasi di mana sektor swasta tidak memiliki minat dalam membangun infrastruktur, pemerintah dapat menggunakan anggaran untuk membangun jalan, jembatan, dan gedung-gedung publik lainnya. Hal ini dapat meningkatkan pengeluaran agregat dan menciptakan lapangan kerja baru. Dalam teori ekonomi Keynesian, kebijakan fiskal juga dapat digunakan untuk mengurangi tingkat pengangguran. Ketika tingkat pengangguran tinggi, pemerintah dapat meningkatkan pengeluaran pemerintah dan/atau menurunkan pajak untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga. Dengan meningkatnya permintaan agregat, perusahaan-perusahaan dapat meningkatkan produksi mereka dan memperkerjakan lebih banyak karyawan. Namun, kebijakan fiskal juga dapat memiliki efek samping yang tidak diinginkan. Misalnya, pengeluaran pemerintah yang tinggi dapat menyebabkan inflasi dan defisit anggaran yang tinggi. Inflasi dapat mengurangi daya beli uang dan merusak stabilitas ekonomi, sedangkan defisit anggaran dapat meningkatkan hutang pemerintah dan memperburuk kesehatan fiskal negara.

## KESIMPULAN

Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pajak untuk mengontrol kestabilan perekonomian. Teori Keynes menyatakan bahwa kebijakan fiskal yang ekspansif dapat membantu mengatasi krisis ekonomi melalui peningkatan pengeluaran pemerintah dan meningkatkan pendapatan negara. Dalam menghadapi krisis ekonomi, kebijakan fiskal dapat digunakan untuk meningkatkan investasi dan ekspor, menjaga stabilitas harga dan nilai tukar, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan kerja sama internasional.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Efdiono (2013), kebijakan fiskal yang ekspansif dinilai dapat mendorong investasi melalui peningkatan Agregat Demand (permintaan agregat) dan investasi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Adji (1995), hasilnya menunjukkan bahwa kebijakan fiskal tidak selalu efektif dalam mengatasi krisis ekonomi. Oleh karena itu, penggunaan kebijakan fiskal dalam mengatasi krisis ekonomi perlu disesuaikan dengan kondisi dan faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian suatu negara. Dalam kesimpulannya, teori Keynes menyatakan bahwa kebijakan fiskal dapat membantu mengatasi krisis ekonomi melalui peningkatan pengeluaran pemerintah dan meningkatkan pendapatan negara. Namun, efektivitas kebijakan fiskal dalam mengatasi krisis ekonomi perlu disesuaikan dengan kondisi dan faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian suatu negara.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Afiftah Tri Ari, Whinarko Juliprijanto, Rian Destiningsih. Analisis Pengaruh Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Dan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Tahun 1988-2017. *Journal of Economic* ,Vol. 1, No. 2
- Lativa Saniatul 2021 Analisis Kebijakan Fiskal Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Meningkatkan perekonomian. *Jurnal Ekonomi*, Volume 23 Nomor 3
- Wijayanti Angeline, Ngadiman. Peran Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia Dalam Menghadapi Resesi Ekonomi Akibat Dampak Pandemi Covid-19 . *Urnal Kontemporer Akuntansi* Vol. 3, No. 1
- Hartati Sri Yuniar , Juli 2021 Analisis Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, Vol 12, No 1.
- Fauziah Aqmarina, Imahda Khoiri Furqon. (2020). Peran Pajak Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal dalam Mengantisipasi Krisis Ekonomi pada masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah* P-ISSN: 2621-4636, 263.
- Harahap, S. R. (2013). Deteksi Dini Krisis Nilai Tukar Indonesia: Identifikasi Periode Krisis Tahun 1995-2011. *Economics Development Analysis Journal*.
- Widianto, Bambang and Choesni, Tb. A.,1999, "Indonesia: The Impact of the Economic Crisis on Industry Performance", Conference Paper, World Bank, Washington DC
- Iva Faizah, - and Misnen Ardiansyah,- (2018) Pengaruh Foreign Direct Investmen (FDI), Domestic Direct Investmen (DDI) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Dengan Belanja Modal Sebagai Moderating. Project Report. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.